

UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PEMBAYARAN PAJAK NON TUNAI DI KOTA MANADO

Linda Purnama Samsuddin

NPP. 31.0896

Asdaf Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara

Program Studi Keuangan Publik

Email :Lindasamsuddin03@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Anindita Primastuti, SE., ME.

ABSTRACT

Problem (GAP): *cashless payment systems have several advantages worth considering. To conduct an in-depth analysis of the implementation of transactions in the Non-Cash Payment System in Manado City and to systematically analyze the impact of the non-cash payment system on the revenue of Regional Original Income (PAD) in Manado City.* **Method:** *The method used in this study is a qualitative method.* **Results/Findings:** *Efforts to increase PAD through non-cash tax payments in Manado City include using the non-cash tax payment system, where all transactions can be well documented and automatically entered into the tax system. The growth of total circulating money can provide an increase in the adoption of non-cash payment technology, and the use of card-based transactions in Manado City shows some significant increases. The use of the Evaluation and Supervision of Budget Realization (EPRA) application, which has been implemented by the Manado City Government, also shows significant improvements.* **Conclusion:** *By using the non-cash tax payment system, all transactions can be well documented and automatically entered into the tax system. The use of card-based transactions in Manado City shows some significant increases. The use of the Evaluation and Supervision of Budget Realization (EPRA) application, which has been implemented by the Manado City Government, supports these improvements. The mechanism of the non-cash tax payment system in Manado City involves collaboration with financial service providers and technology companies. It requires creating infrastructure that supports the non-cash payment system and providing various non-cash payment options such as bank transfers, debit, credit cards, digital wallets, or using payment applications.*

Keywords: *Non-Cash Payments, Regional Revenue, Financial Accountability*

1956

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): *Sistem pembayaran non tunai memiliki beberapa keunggulan yang layak dipertimbangkan.* **Tujuan:** *Untuk menganalisis secara mendalam pelaksanaan transaksi pada Sistem Pembayaran Non Tunai di Kota Manado dan menganalisis secara sistematis dampak yang dihasilkan oleh sistem pembayaran non tunai terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado.* **Metode:** *Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif.* **Hasil/Temuan:** *Upaya meningkatkan PAD melalui pembayaran pajak non tunai di Kota Manado mencakup dengan menggunakan sistem pembayaran pajak non tunai penggunaan transaksi berbasis kartu di Kota Manado menunjukkan beberapa peningkatan yang signifikan dan penggunaan aplikasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Manado.* **Kesimpulan:** *Dengan menggunakan sistem pembayaran pajak dan tunai maka penggunaan transaksi berbasis kartu di Kota Manado menunjukkan beberapa peningkatan yang signifikan.*

Penggunaan aplikasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Manado. Mekanisme sistem pembayaran pajak non tunai Di Kota Manado. Berkolaborasi dengan pihak yang menyediakan layanan keuangan serta teknologi. Menciptakan infrastruktur yang memberikan dukungan terhadap sistem pembayaran non tunai. Menyediakan beragam opsi pembayaran non tunai contohnya transfer bank, debit, kartu kredit, dompet digital, atau menggunakan aplikasi pembayaran.

Kata Kunci: Pembayaran Non Tunai, Pendapatan Daerah, Akuntabilitas Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pembayaran non tunai telah menjadi salah satu aspek yang mendominasi transformasi ekonomi global pada era digital. Di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, penggunaan uang tunai semakin berkurang. Manado, sebagai salah satu kota utama di Indonesia, tidak luput dari tren ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Manado telah mengalami pergeseran signifikan menuju pembayaran non tunai, dengan berbagai metode seperti kartu debit, kredit, dan aplikasi pembayaran digital yang semakin populer (Kurniawati et al., 2021). Segi pembayaran non tunai, meskipun pertumbuhannya melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, transaksi *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) di Sulawesi Utara masih menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan laporan. Tidak seperti BI-RTGS, transaksi SKNBI mengalami penurunan, baik dalam hal jumlah uang yang ditransfer maupun jumlah transaksi, akibat perubahan preferensi masyarakat yang lebih suka menggunakan BI-FAST sebagai inovasi sistem pembayaran dengan transfer dana yang lebih cepat, biaya yang lebih rendah, dan ketersediaan sepanjang waktu.

Tren penerimaan terus terlihat dalam nilai transaksi non tunai selama triwulan I 2023. Sementara itu, transaksi menggunakan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) menunjukkan tingkat kestabilan yang relatif selama triwulan tersebut. Di sisi lain, penggunaan uang elektronik (UE) di Sulawesi Utara menunjukkan perlambatan, meskipun tidak sekuat periode sebelumnya (Sukmadinata, 2019). Di Sulut, penggunaan QRIS masih menunjukkan perkembangan positif, didorong oleh program berkelanjutan untuk memperluas jumlah pengguna baru QRIS melalui kegiatan sosialisasi yang rutin dilakukan, dengan tujuan mencapai target 45 juta pengguna baru secara nasional pada tahun 2023. Selama lima tahun terakhir di Kota Manado, terdapat variasi yang mencolok dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah. Pada tahun 2018, anggaran atau pagu sebesar 184.807,47 miliar berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai 194.189,58 miliar, menghasilkan persentase 105.08%. Tahun 2019 menunjukkan stabilitas, di mana anggaran 208.768,79 miliar hampir sejalan dengan realisasi 208.938,20 miliar, dan persentasenya mencapai 100.08%. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan yang cukup signifikan, dengan anggaran 235.267,33 miliar yang hanya terealisasi sebesar 179.170,49 miliar, mencapai persentase 76.16%. Tahun 2021 mencatat kembali peningkatan, meskipun tidak mencapai anggaran yang ditetapkan, dengan realisasi sebesar 199.306,00 miliar dan persentase 91.63%. Puncak tertinggi terjadi pada tahun 2022, di mana anggaran 230.237,92 miliar terlampaui dengan realisasi 233.265,47 miliar, mencapai persentase tertinggi selama periode tersebut, yaitu 101.31%. Dinamika ini mencerminkan perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal yang mempengaruhi kontribusi pajak daerah dalam mendukung keuangan Kota Manado selama periode tersebut.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas dan dampak positif sistem pembayaran non tunai terhadap PAD Kota Manado. Penelitian ini menetapkan batasan yang cermat dengan fokus utama pada sistem

pembayaran non tunai. Penelitian ini menyoroti aspek penting dalam konteks pendapatan retribusi daerah dan pajak daerah, memperkuat pemahaman terhadap dampak penerapan metode pembayaran non tunai terhadap dua sektor krusial tersebut. Dengan penuh dedikasi, peneliti berusaha menggali lebih dalam, memaparkan setiap nuansa dan kompleksitas yang mungkin muncul dari interaksi antara sistem pembayaran non tunai dengan dinamika pendapatan daerah. Dengan memfokuskan perhatian pada aspek ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi berharga dalam pemahaman praktik pembayaran non tunai dan implikasinya terhadap sistem keuangan pemerintah daerah, membuka pintu bagi pemikiran yang lebih mendalam dan solusi inovatif dalam mengoptimalkan proses pembayaran yang terkait dengan retribusi dan pajak daerah.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan pemuda maupun konteks kegiatan membudayakan literasi masyarakat. Penelitian ini sepakat dan memiliki arah yang sama dengan penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Koleangan dan Rotinsulu pada tahun 2019 berjudul "Analisis Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado" Mengulas manfaat penerapan sistem pembayaran tanpa uang tunai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Manado. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penggunaan sistem transaksi non tunai telah membawa keuntungan berupa kemampuan untuk melacak aliran dana dalam seluruh transaksi, sehingga menghasilkan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi (Monginsidi et al., 2019). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap transaksi didukung oleh bukti yang sah, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan daerah (Monginsidi, Koleangan, dan Rotinsulu, 2019). Santika, Aliyani, dan Mintarsih pada tahun 2022 berjudul "Persepsi Dan Intensi Pelaku UMKM Terhadap Penggunaan QRIS Sebagai Sistem Pembayaran Digital Di Kota Tasikmalaya." Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki pandangan positif terhadap QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai solusi pembayaran digital. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaku UMKM memiliki niat yang tinggi untuk mengimplementasikan sistem pembayaran digital melalui QRIS (Santika, Aliyani, dan Mintarsih, 2022). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mais, R. G., & Yuniara, W. pada tahun 2021 mengenai efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta periode 2015-2019 menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah selama rentang waktu tersebut tergolong cukup efektif. Meskipun demikian, hasil menunjukkan bahwa kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan PAD DKI Jakarta dalam periode yang sama sangat kurang, dan rasio kontribusinya cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Penelitian yang dilakukan oleh Suciarti, S., Pahmi, P., Latief, N., & Syamsuddin, I. pada tahun 2022 mengenai analisis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang menunjukkan bahwa pajak dan retribusi memiliki kontribusi sebesar 52,78% selama lima tahun terakhir. Hasil ini menegaskan bahwa pemungutan pajak dan retribusi perlu dilakukan secara optimal. Rasio efisiensi dan efektivitas yang digunakan sebagai indikator keberhasilan menunjukkan tingkat sangat efisien, yakni sebesar 3% dan 3,1%. Penelitian Tumija, Asep Hendra, Marja Sinurat (2023), . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah sudah dilaksanakan, namun pada dimensi sumber daya terutama pada indikator fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap), menu yang digunakan sudah ada namun belum bisa diakses. Hambatan Penerapan SIPD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Semarang antara lain pelatihan SIPD dari pemerintah pusat belum optimal, Server yang tersedia kurang kuat; dan teknis pengelolaan keuangan terkait dengan Aklap laporan Realisasi Anggaran, menunya belum tersedia, sehingga laporannya belum balance dan pengembalian LS Kas Umum belum sesuai. Strategi dalam mengatasi hambatanya menggunakan strategi SO (Strenght-Opportunity), SC (Strenght-

Culture) dan AgC (Agility-Culture). Penelitian yang dilaksanakan oleh Habibah Nurul Fitri, Rahma Nazila Muhammad, Mia Rosmiati (2021), Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penerapan pembayaran E-SAMSAT PKB dapat meningkatkan PAD dilihat dari dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara umum sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan penerimaan PKB pada tahun 2016-2019, yang berdampak pada peningkatan PAD. Penelitian yang dilaksanakan oleh Elli Fitriyani, Nedi Hendri, Karnila Al (2021), berdasarkan hasil penelitian, rata-rata tingkat pertumbuhan pajak hotel dari tahun 2016-2020 dikatakan tidak berhasil, sementara untuk pajak restoran dikatakan kurang berhasil. Rata-rata efektivitas pajak hotel dan pajak restoran tahun 2016-2020 dengan kriteria sangat efektif, dan untuk rata-rata tingkat kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap P AD dari tahun 2016-2020 dengan kriteria sangat kurang berkontribusi. Penelitian yang dilaksanakan oleh Dedy S. Palyama, Udin Hamim, Herwin Mopangga (2023), dari aspek formulasi pemerintah provinsi Gorontalo melakukan mekanisme perencanaan setiap tahunnya tertuang dalam dokumen renstra. implementasi sistem data masih terpusat di badan keuangan keengganan wajib pajak melakukan pembayaran pajak kurangnya SDM serta anggaran. Evaluasi badan keuangan melakukan razia kerja sama bersama kepolisian dan Dinas Perhubungan. Faktor penghambat dalam optimalisasi adalah aspek pendataan wajib pajak, sumber daya manusia, pelayanan, koordinasi, kesadaran wajib pajak dan status kepemilikan kendaraan. Disarankan Perlunya pemerintah provinsi Gorontalo membuat terobosan dalam melakukan pungutan pajak kendaraan bermotor dengan memanfaatkan teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, konsisten melakukan Razia/sweeping masyarakat patuh dan taat pajak. Meningkatkan Organisasi bidang pendapatan menjadi Badan Pendapatan Daerah. Penelitian Haryono, H.(2020), Kabupaten Landak telah memiliki kesiapan yang baik untuk pelaksanaan Transaksi Non Tunai, baik dari segi infrastruktur maupun Sumber Daya Manusia (SDM) nya. Prosedur pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Kabupaten Landak pun telah diatur dalam Peraturan Bupati Landak No. 59 Tahun 2017 tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak. Secara keseluruhan pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Beberapa kendala yang masih dijumpai dalam pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Kabupaten Landak berasal dari pihak eksternal, yaitu pihak Bank Kalbar dan pihak penyedia jaringan internet (provider telekomunikasi). Penelitian Lidanna Dian Kurnia (2021), penerapan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah pada sekretariat daerah Kota Metro Provinsi Lampung memberikan banyak manfaat yaitu transaksi menjadi sangat efisien dan juga efektif. Keuntungan penerapan sistem transaksi non tunai yaitu penggunaan aliran dana seluruh transaksi dapat ditelusuri sehingga lebih akuntabel dikarenakan seluruh transaksi didukung dengan bukti yang sah; bendahara tidak harus memegang uang tunai dengan berbagai resiko kejahatan, kehilangan dan kesalahan hitung; menghindari penyalahgunaan keuangan di perangkat daerah; penggunaan anggaran lebih efisien dan arus keluar masuk kas lebih terkontrol; meningkatkan pengendalian internal pengelolaan kas dan mempermudah bendahara penerimaan penagihan. Selain itu, transaksi non-tunai cenderung lebih hemat biaya apabila dibandingkan penggunaan transaksi tunai dengan uang kartal alias uang kertas maupun uang logam dan mempercepat pelaksanaan tutup buku serta pelaporan keuangan dan dijamin keandalannya. Penelitian Husna Rahma Dona (2018), Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengelolaan keuangan non-tunai di Sekretariat Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dimulai pada bulan September 2017. Penerapan transaksi non-tunai berbasis online ini memerlukan mekanisme dan alur yang terstruktur untuk pelaksanaan Prosedur Operasional Standar (SOP). Namun, dalam pelaksanaannya, muncul berbagai hambatan seperti bendahara yang belum sepenuhnya mengikuti alur dalam SOP, seringnya terjadi kesalahan pada aplikasi, dan meningkatnya beban kerja bendahara.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penelitian tentang upaya meningkatkan PAD melalui pembayaran pajak non tunai di Kota Manado.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis secara mendalam upaya meningkatkan PAD melalui pembayaran pajak non tunai di Kota Manado dan untuk menganalisis secara sistematis mekanisme sistem pembayaran pajak non tunai Di Kota Manado.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono,2019). Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Penerimaan PAD. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tentang upaya meningkatkan PAD melalui pembayaran pajak non tunai di Kota Manado dan untuk menganalisis secara sistematis mekanisme sistem pembayaran pajak non tunai Di Kota Manado.

3.1 Upaya meningkatkan PAD melalui pembayaran pajak non tunai di Kota Manado

Penerapan sistem transaksi non-tunai di Kota Manado dan Bapenda Kota Manado merupakan langkah yang signifikan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan efisiensi dalam mengelola dana publik. Pemerintah kota telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan proses pencairan dana tunai dan telah menerapkan berbagai langkah untuk memastikan penggunaan dana publik yang tepat. Manfaat dari sistem transaksi non-tunai termasuk peningkatan efisiensi, pengurangan risiko, dan peningkatan akuntabilitas dan transparansi keuangan (Marka et al,2023). Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya, terutama dalam hal penerimaan retribusi. Penerapan berbagai pembayaran secara non-tunai merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola keuangan di Kota Manado. Pemerintah kota juga telah menandatangani MOU dengan Bank Sulut untuk meningkatkan transaksi non-tunai untuk layanan keuangan di Pemerintah Kota Manado.

Sistem transaksi non-tunai ini diterapkan pada penerimaan dan pengeluaran pemerintah kota, termasuk transaksi dengan pihak ketiga. Sistem tersebut telah diimplementasikan melalui Cash Management System (CMS) yang disediakan oleh PT Bank Sulut. Meskipun implementasi sistem transaksi non-tunai telah berhasil dalam banyak aspek, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi. Sebagai contoh, sistem ini belum sepenuhnya diimplementasikan dalam kasus pendapatan retribusi, karena jumlahnya sering di bawah Rp. 20.000 dan sulit untuk diproses dalam transaksi non-tunai. Peningkatan pembayaran pajak non tunai merupakan suatu strategi yang bisa memiliki potensi untuk memberikan peningkatan pendapatan asli daerah di kota Manado. Kondisi ini meminimalisir resiko kesalahan pencatatan dan potensi menghindari pajak serta transaksi otomatis data tercatat. Pembayaran pajak non tunai juga bisa meminimalisir kesempatan pengedaran pajak sebab transaksi tidak dapat disembunyikan atau dilaksanakan dengan tidak resmi. Kondisi ini dapat memberikan jaminan jika seluruh transaksi yang dikenakan pajak dapat dipantau dan diproses dengan baik. Dengan menggunakan pembayaran pajak non tunai tahapan administrasi yang berkaitan dengan pajak bisa lebih efektif. Pemerintah daerah tidak harus menghabiskan waktu dan sumber daya untuk melakukan pengecekan transaksi manual sebab sistem bisa melaksanakan pemantauan secara otomatis.

Pembayaran pajak non tunai juga bisa memberikan peningkatan kepercayaan kepada masyarakat terhadap sistem perpajakan yang ada di kota Manado (Fitriana & Nurbaety,2016).

Masyarakat akan melihat jika tahapan perpajakan menjadi lebih terbuka dan adil sehingga masyarakat dapat mempunyai dorongan untuk membayar pajak. Pembayaran pajak non tunai juga bisa meminimalisir biaya yang berkaitan dengan pengelolaan uang tunai termasuk biaya keamanan, pengangkutan hingga biaya pengelolaan kas. Pemerintah kota Manado bisa menggunakan sistem pembayaran digital yang ada dan mengembangkan solusi baru yang sejalan dengan keperluan masyarakat kota Manado. Hal-hal tersebut dapat menjadi upaya memberikan peningkatan pendapatan anggaran daerah kota Manado melalui pembayaran pajak non tunai. Dinilai menggunakan indikator kartu dan aplikasi pada dimensi *non cash payment* dapat diketahui bahwa penggunaan transaksi berbasis kartu di Kota Manado menunjukkan beberapa peningkatan yang signifikan. Transaksi menggunakan kartu ATM dan debit terus tumbuh secara nasional, termasuk di daerah-daerah seperti Sulawesi Utara, yang mencakup Kota Manado. Transaksi non-tunai, termasuk yang menggunakan kartu debit dan kredit, telah meningkat meskipun ada persaingan dari metode pembayaran digital lainnya seperti QRIS dan dompet digital. Misalnya, penggunaan QRIS di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan, dengan jumlah transaksi mencapai Rp 229,96 triliun pada tahun 2023. Di Manado, pemerintah daerah telah mendorong penggunaan transaksi non-tunai untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi anggaran daerah. Langkah ini diharapkan dapat membantu mengurangi biaya administrasi dan meningkatkan penerimaan daerah melalui peningkatan kepatuhan pembayaran pajak dan retribusi yang lebih mudah dilakukan secara elektronik (Febriartaty et al,2018).

Selain itu, kesadaran dan adopsi masyarakat terhadap pembayaran digital semakin meningkat. Tren ini didorong oleh generasi muda yang lebih cenderung menggunakan teknologi digital untuk transaksi sehari-hari. Kondisi ini sejalan dengan strategi nasional untuk mendorong digitalisasi sistem pembayaran yang aman dan efisien. Secara keseluruhan, transaksi berbasis kartu di Manado adalah bagian dari tren nasional yang lebih luas menuju pembayaran non-tunai dan digital. Ini memberikan potensi signifikan untuk peningkatan efisiensi anggaran daerah dan peningkatan pelayanan publik melalui teknologi keuangan yang lebih canggih. Efektivitas transaksi berbasis kartu, seperti kartu debit dan kredit, dalam meningkatkan anggaran daerah di Kota Manado cukup signifikan. Implementasi transaksi non-tunai membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tercermin dalam penggunaan aplikasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Manado. EPRA meningkatkan pemantauan yang lebih akurat terhadap realisasi anggaran, membantu mengurangi potensi kebocoran dana, dan memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.

3.2 Mekanisme sistem pembayaran pajak non tunai Di Kota Manado

Mengimplementasikan sistem pembayaran pajak non tunai maka beberapa mekanisme yang diterapkan oleh pemerintah kota Manado mencakup berkolaborasi dengan pihak yang menyediakan layanan keuangan serta teknologi untuk menciptakan infrastruktur yang memberikan dukungan terhadap sistem pembayaran non tunai. pemerintah daerah harus melaksanakan kampanye edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegunaan dan upaya memanfaatkan pembayaran non tunai. Kondisi ini bisa dilaksanakan menggunakan beragam saluran komunikasi contohnya media sosial, seminar, serta lokakarya (Lintangsari et al,2018). Menyediakan beragam opsi pembayaran non tunai contohnya transfer bank, debit, kartu kredit, dompet digital, atau menggunakan aplikasi pembayaran. Sistem pembayaran non tunai di kota Manado harus dapat terintegrasi dengan sistem perpajakan yang ada di kota Manado. Kondisi ini dapat memberikan jaminan jika pembayaran yang

diperoleh otomatis tercatat pada sistem pajak. Pemerintah kota Manado juga harus memberikan jaminan jika sistem pembayaran non tunai yang diimplementasikan dapat memberikan perlindungan hukum. Kondisi ini mencakup pemanfaatan teknologi enkripsi yang kuat dan kepatuhan terhadap undang undang yang ditetapkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kota Manado (Kurniawati et al,2021).

Penerapan kebijakan transaksi non-tunai di Kota Manado telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat pada perbandingan pendapatan daerah sebelum penggunaan non tunai diberlakukan dan sesudah penggunaan non tunai diberlakukan di Kota Manado.

Tabel 3.1 Pendapatan Daerah Sebelum Penggunaan Pembayaran Menggunakan Non Tunai di Kota Manado

No	Jenis Pendapatan	2019	2020	2021
1	Pendapatan Daerah	3.940.162.962	3.738.613.828	3.923.344.821

Sumber : Bapenda Kota Manado,2024

Berdasarkan tabel 3.1 diatas dapat diketahui jika pendapatan daerah mengalami penurunan dari yang awalnya pada tahun 2019 sebanyak 3.940.162.962, pada tahun 2020 hanya sebesar 3.738.613.828, dan kembali mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021 3.923.344.821. Dapat diketahui jika ada peningkatan pendapatan daerah sesudah pemerintah Kota Manado mengimplementasikan sistem pembayaran non tunai. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Pendapatan Daerah Sesudah Penggunaan Pembayaran Menggunakan Non Tunai di Kota Manado

No	Jenis Pendapatan	2019	2020	2021
1	Pendapatan Daerah	4.740.182.992	3.899.654.342	4.965.356.781

Sumber : Bapenda Kota Manado,2024

Berdasarkan tabel 3.2 diatas dapat diketahui jika pendapatan daerah mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelum pembayaran non tunai diimplementasikan di Kota Manado. Peningkatan pendapatan daerah diperoleh dari berbagai sumber mulai dari hiburan, retribusi daerah, dan lain sebagainya. Adanya peningkatan pendapatan daerah ini dikarenakan masyarakat Kota Manado sekarang lebih mudah memperoleh pelayanan. Masyarakat Kota Manado diperbolehkan menggunakan sistem pembayaran non tunai sebab tidak hanya mudah digunakan tapi sistem pembayaran non tunai ini juga dapat dilaksanakan dengan cepat sehingga memberikan kepuasan bagi masyarakat setempat yang memperoleh pelayanan.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Dibandingkan dengan metode pembayaran tunai, ketika unit kerja harus melakukan pembelanjaan dalam jumlah besar, wajib pajak tidak perlu repot menghitung ulang jumlah uang tunai yang diberikan saat transaksi karena metode pembayaran nontunai dapat dilakukan secara online secara real-time. Proses pembayaran dapat berlangsung dengan lebih cepat dan nilai transaksi akan sesuai dengan jumlah tagihan yang harus dibayarkan. Lebih lanjut, menggunakan metode pembayaran nontunai dapat mencegah potensi kerugian akibat kesalahan perhitungan dari dinas terkait atau pihak wajib pajak.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa upaya meningkatkan PAD melalui pembayaran pajak non tunai di Kota Manado mencakup penggunaan transaksi berbasis kartu di Kota Manado menunjukkan beberapa peningkatan yang signifikan dan penggunaan aplikasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Manado. Penggunaan transaksi berbasis kartu di Kota Manado menunjukkan beberapa peningkatan yang signifikan. Penggunaan aplikasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Manado. Mekanisme sistem pembayaran pajak non tunai Di Kota Manado. Berkolaborasi dengan pihak yang menyediakan layanan keuangan serta teknologi. Menciptakan infrastruktur yang memberikan dukungan terhadap sistem pembayaran non tunai. Menyediakan beragam opsi pembayaran non tunai contohnya transfer bank, debit, kartu kredit, dompet digital, atau menggunakan aplikasi pembayaran.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu waktu dan biaya yang cukup terbatas. Wawancara penelitian hanya dilakukan kurang dari 7 hari dari waktu penelitian

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih terbatas nya temuan yang peneliti temukan, oleh karena itu agar dapat dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa untuk menambah rekomendasi dan mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan baru yang dikhawatirkan akan muncul.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bapenda Kota Manado beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dona, H. R., & Khaidir, A. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Dengan Transaksi Non Tunai Di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal MIAP: Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 56-70.
- Febriartaty, R. A., Parubak, A. S., & Yogaswara, R. (2018). Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning (PBJL) Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik Kelas XI IPA 1 SMA Kristen YABT Pada Materi Sistem Koloid. *Chemistry Education Journal*, 85– 91.
- Fitriana, L. A., & Nurbaeti, S. (2016). Sampling Half of the Population: A Comparative Study of Sampling Techniques. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Indonesia*, 2(1), 44–51.

- Fitri, H. N., Muhammad, R. N., & Rosmiati, M. (2021). Analisis Kebijakan Penerapan E-SAMSAT Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 339-348.
- Haryono, H. (2020). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak. *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 9(2).
- Kurnia, L. D. (2020). Analisis Efisiensi Penerapan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Sekretariat Daerah Kota Metro Provinsi Lampung. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 14(1).
- Kurniawati, E. T., Zuhroh, I., & Malik, N. (2021). Literasi dan Edukasi Pembayaran Non Tunai Melalui Aplikasi QRCode Indonesian Standard(QRIS) Pada Kelompok Milenial. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 5(1), 23–30. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/skie/article/view/14674/8998>
- Lintangsari, N. N., Hidayati, N., Purnamasari, Y., Carolina, H., & Ramadhan, W. F. (2018). Analisis pengaruh instrumen pembayaran non-tunai terhadap stabilitas sistem keuangan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 47–62.
- Marka, K. R., Nugroho, A. A., & Zuhri, N. (2023). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi, dan Trend Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(6), 1581-1592.
- Monginsidi, E. C., Koleangan, R. A., & Rotinsulu, D. C. (2021). Analisis implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 20(1), 15-30.
- Palyama, D. S., Hamim, U., & Mopangga, H. (2023). Analisis Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Gorontalo. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 6372-6384.
- Santika, A., Aliyani, R., & Mintarsih, R. (2022). Persepsi Dan Intensi Pelaku Umkm Terhadap Penggunaan Qris Sebagai Sistem Pembayaran Digital Di Kota Tasikmalaya. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 2(4), 61-70.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI).
- Sukmadinata. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. UPI.
- Tumija, T., Hendra, A., & Sinurat, Marja. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi*, 79-91.